

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIV. NEGERI PADANG

# KETERLIBATAN **CIA** DALAM KASUS PRRI

**Mestika Zed**

**Pusat Kajian Sosial-Budaya & Ekonomi (PKSBE)**

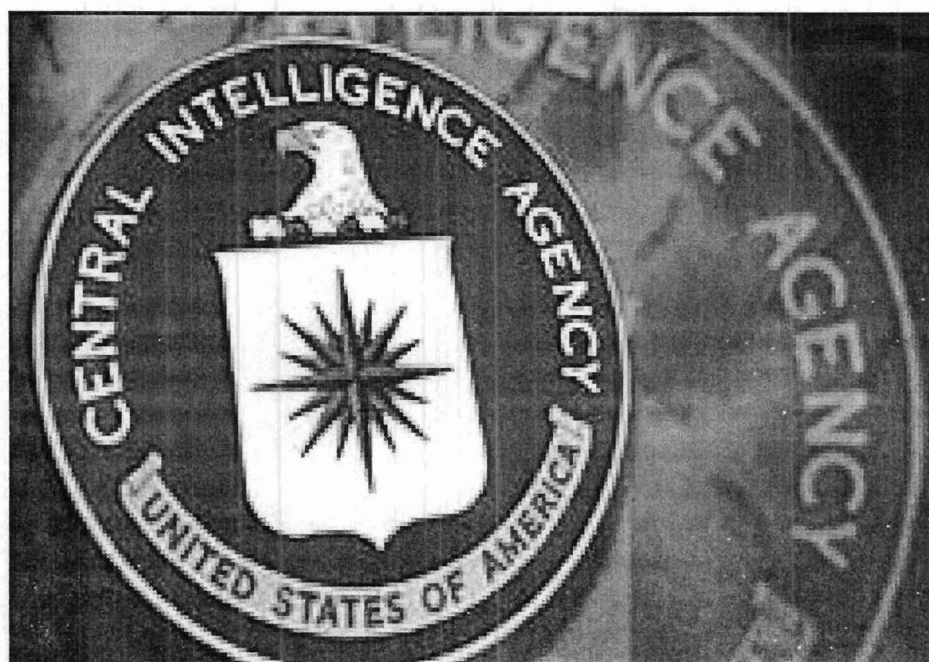
**Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang**

MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG	
TERIMA TGL. :	20 Juni 2011
BIAYA HARGA :	Hd
NO. KOLEKSI :	101
NO. INVENTARIS :	206 Hd /2011-k.1 (1)
KLASIFIKASI :	959.8031 Zed k.1

**Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Sejarah PRRI,  
diselenggarakan oleh STKIP PGRI Padang, 14 Maret 2009**

# KETERLIBATAN CIA DALAM KASUS PRRI

---



Makalah Pengantar untuk Seminar Nasional tentang Sejarah PRRI,  
diselenggarakan oleh STKIP PGRI Padang, 14 Maret 2009.

Oleh: **Mestika Zed**  
Pusat Kajian Sosial-Budaya & Ekonomi (PKSBE),  
FIS, Univ. Negeri Padang

## KETERLIBATAN CIA DALAM KASUS PRRI \*)

---

**T**UJUAN makalah ini ialah untuk membahas kasus PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) dalam perspektif yang lebih luas, khususnya berkenaan dengan keterlibatan agen rahasianya (CIA) Amerika Serikat. Hanya ada tiga pertanyaan pokoknya yang ingin dijawab dalam makalah ini: (i) apakah keterlibatan AS dalam kasus PRRI merupakan faktor kebetulan (*contingency*), atau sudah menjadi bagian dari watak kebijakan luar negerinya yang sudah berakar dalam sejarah yang panjang? (ii) bagaimana keterlibatan itu terjadi?; (iii) apa konsekuensinya terhadap problem dalam negeri Indonesia?

Dengan ketiga pertanyaan di atas, argumen pokok (tesis) yang ingin dikemukakan di sini ialah, bahwa Indonesia hampir selalu tidak siap dalam menghadapi setiap perubahan mendadak. Sebagian karena lemah dalam sistem, sebagian lain peranan individu (*agency*) yang selalu lebih *decisive* ketimbang sistem atau struktur. Akibatnya terjadilah apa yang disebut *sybernetic noise* (kegaduhan sibernetik), yakni adanya semacam *disoriented* sosial-politik, akibat terganggunya tertib sosial di antara pelaku atau orang-orang, lembaga dan aturan yang ada.<sup>1</sup>

### Sejarah Keterlibatan AS di Asia.

- Keterlibatan AS dalam kasus PRRI bukanlah hal yang kebetulan, misalnya karena ada 'perang dingin' (*cold war*), melainkan karena memang sudah menjadi watak politik luar negerinya sejak dulu. Keterlibatan AS di Asia sudah cukup lama dan dalam, jauh lebih dalam daripada yang dibayangkan oleh rakyat di negerinya.<sup>2</sup> Dalam sejarah Indonesia, khususnya Sumatera, kapal-kapal Amerika AS sudah berlabuh di pantai Padang pada tahun 1770-an, yakni tak lama setelah kemerdekaan negerinya dari Inggris (1776), bersamaan dengan merosotnya hegemoni VOC di pantai barat Sumatera. Karena itu kapal-kapal Amerika dari

---

\*) Makalah Pengantar untuk Seminar Nasional tentang Sejarah PRRI, diselenggarakan oleh STKIP PGRI Padang, 14 Maret 2009.

<sup>1</sup> Konsep "sibernetik noise" biasa dipakai dalam teori sosial dalam kerangka analisis teori konflik dan kekerasan dalam sistem sosial-politik tertentu seperti yang diajukan dalam A. Wilden, *System and Structure: Essays in Communication and Exchange* (London: Tavistock, 1972).

Marvin Kal and Elie Abel, *Roots of Involvement. The US in Asia 1784-1971* (New York: WW. Norton & Company, Inc., 1971).

Kota Salem dan Boston relatif leluasa berlabuh, dan memuat kopi Minangkabau yang dikapalkan ke negerinya.<sup>3</sup>

- Sejak itu, dan periode berikutnya keterlibatan regional AS di Asia makin luas: Asia Tenggara, Asia Timur dan Asia Selatan. Ini tidak hanya dalam bentuk hubungan dagang, melainkan juga bersifat politik. Hampir setiap presiden AS memiliki “doktrin politik luar negeri” masing-masing (paling terkenal di antaranya “Monroe Doctrin”, “Roosevelt Doctrin” “Neixon Doctrin” dst.). Meskipun masing-masing rejim tampil dengan gaya kahsnya masing-masing, gaya politik luar negeri AS yang paling konstant sepanjang masa, ialah menggabungkan antara *pragmatisme* dan idealisme utopik “American Dream”. Di satu pihak ingin menjaga hubungan baik dengan negara lain tanpa mau terlibat terlalu jauh. Di lain pihak ia ingin mengubah saentero dunia menurut citra Amerika sendiri, yakni mendambakan kemakmuran dengan berkah *belief in God* seperti yang tertulis dalam lembaran dolar AS (US\$).
- Kombinasi antara keengganan untuk terlibat jauh dengan negara lain, tetapi di lain pihak ingin tetap menjadi bagian yang penting adalah sesuatu yang paradoks, paradoks antara keinginan untuk menyendiri (isolasionis) tapi pada saat yang sama ingin melibatkan diri (intervensionis). Inkonsistensi atau sifat tidak taat asas ini membuatnya menjadi petualangan dan kalau perlu, meminjam pharase Prof. Kahin (1998), membenarkan “subversi” sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya.
- Pada masa PD II, saat AS tampil sebagai negara *superpower* dunia, London, Paris, Berlin dan Moscow tak bisa lagi mengabaikan kehadiran AS di Asia. Tak lama setelah PD II meletus di Eropa (1939), AS mengirim ekspedisi militer pertamanya ke Eropa. Hanya dua puluh tahun sebelumnya negara itu juga pernah mengirim ekspedisi serupa ke Filipina untuk mengusir kekuasaan Spanyol di sana. Sejak itu Amerika makin hegemonik dan menjadi salah satu kutub kekuatan *superpower* di Blok Barat (kapitalis) berhadapan dengan Blok Timur (komunis) di bawah kepemimpinan Uni-Soviet. Keduanya terlibat dalam apa yang disebut “perang dingin” (*civil war*), suatu pertempuran ideologis yang seringkali memercikkan api “perang dunia” ketiga yang dilokalisir. Keduanya memicu “perang saudara” di mana-mana, Asia dan di Eropa. Keterlibatan AS dalam “perang saudara” di Asia, di Korea, Indoncina, seperti juga di Indonesia (PRRI) tidak bisa dilepaskan dari kerangka perang dingin ini.

#### Indonesia (PRRI), Indocina dan CIA: Sebuah Perbandingan.

- Keterlibatan AS dalam PRRI dan di Indocina berlangsung pada fase perang dingin tahap kedua (1950-an-1960-an).<sup>4</sup> Hanya saja di Indocina keterlibatan AS menjadi

---

<sup>3</sup> Christine Dobbin, *Islamic Revivalism in A Changing Peasant Eonomi. Central Sumatra, 1780-1847* (Malmo and London: Curzon Press, 1984), hal. 68.

<sup>4</sup> Perang dingin paska PD II berlangsung dalam tiga-fase berikut: *Fase I*, konfrontasi antara AS dan Rusia di Eropa, ketika Rusia terus menerus mendorong berdirinya negara-negara komunis di Eropa

semakin kritikal, dan berlarut-larut pada fase ketiga. Selain itu, jika dalam kasus PRRI keterlibatan operasinya terselubung (*undercover operation*) di Indocina bersifat terbuka. Keduanya adalah “subyek” politik luar negeri AS yang *ambivalence* dalam kerangka perang dingin, yakni perebutan pengaruh di wilayah yang dulunya sama-sama bekas wilayah jajahan. Indonesia bekas jajahan Belanda, sedangkan Indocina tadinya di bawah Perancis. Di Indocina kekuatan kapitalis dan komunis relatif berimbang, sehingga selapas PD II, negeri ini, seperti juga di Jerman (Eropa), Korea (Asia), terbelah dua antara utara yang didukung Uni-Soviet dan selatan yang didukung AS. Ini tidak terjadi di Indonesia.

- Setelah peristiwa [kudeta] Madiun (1948), yang gagal itu, komunis Indonesia (PKI) dibuat babak-belur. Namun segera bangkit bangkit lagi secara menakjubkan. Dalam waktu hanya lima tahun, yakni setelah pemberontakan PKI di Madiun itu, partai ini tampil sabagai salah satu dari “empat besar” pemenang Pemilu I (1955): Kecenderungan ini amat mencemaskan AS kalau-kalau Indonesia akan menjadi Korea atau Indocina “kedua”. Argumennya cukup sederhana. Kalau kemajuan komunis di Indonesia tidak segera diblokir, ada harapan seluruh Asia Tenggara akan digulung habis oleh komunis. Inilah salah satu alasan keterlibatan AS di Indonesia paska Madiun dan sekali lagi pra-PRRI tahun 1950-an.

### Keterlibatan CIA dalam Kasus PRRI

- Sebelum mempelajari keterlibatan CIA dalam PRRI marilah kita sebentar melakukan *flash-back* (kilas balik) terhadap sejarah “perang saudara” antara PRRI dan Jakarta dalam empat fase berikut:
  - ▣ Fase 1: *Prakondisi 1956-1957*. Pusat mengabaikan gerakan protes daerah karena perilaku kekuasaan Jakarta yang tidak mau mendengar aspirasi rakyat. Ketidakpuasan daerah muncu. Terutama akibat pengunduran diri Hatta sebagai Wapres Des. 1956; ketidakadilan pusat dalam pembagian “kue pembangunan” yang pada dasarnya berasald ari daerah luar Jawa; pengebirian kekuatan kelompok militer Sumatera Barat oleh KSAD Jend. Nasution, dan *tour de force* dari kelompok PKI (MestikaZed, 1999). Akibatnya terjadi konsolidasi kekuatan daerah lewat gerakan otonomi daerah dengan membentuk dewan-dewan di Sumatera dan Sulawesi. Pelopornya ialah kelompok Kol. Ahmad Husein, komando militer Sumatera Tengah dengan mendirikan Dewan Banteng. Kemudian disusul oleh

---

Timur-Tengah (1945-198) sebagai tandingan atas Eropa Barat yang sudah berada di bawah pengaruh AS. Jadi lokusnya di Eropa; *Fase II*: konfrontasi pindah ke Asia dan Amerika Tengah, mulai dari Perang Korea (1950-51), Indonesia hingga Krisis Misil di Kuba (1962). Panggung perang dingin makin melebar ke “Dunia Ketiga”. *Fase III*: masih ditandai konfrontasi militer dan kompetisi ekonomik, tetapi masalahnya makin kompleks ketika ketegangan antara kedua kubu diselingi dengan sikap “koperatif” lewat hubungan diplomatik dalam suasana batin “love-and-hate”. Jadi tidak lagi semata-mata konfrontatif-eksplisif, seperti saat meletusnya Perang Vietnam sejak 1972, tetapi juga mengambil sikap koperatif setegah hati dan kucing-kucingan untuk mengurangi ketegangan lewat politik “*détente*” sampai ambruknya blok timur tahun 1980-an. Lihat Charles Gati (ed.), *Caging the Bear. Containment and the Cold War* (Indianapolis, New York: The Bobbs-Merrills Company, Inc., 1974), hal. xiv-xv.

Dewan Garuda di Sumatera Selatan (Kol. Burlian), Dewan Gajah di Sumatera Utara (Kol. Simbolon) dan Permesta di Sulawesi (Kol. Ventje Samual).

Sejak itu, di Sumatera Tengah khususnya, dengan semangat otonomi daerah, pembangunan berjalan sangat pesat. Gedung-gedung, rumah sakit dibangun. Anak-anak sekolah (SMP, SMA) dan mahasiswa dikerahkan untuk bergotong royong membangun rumah sakit. Infrastruktur diperbaiki, termasuk pembangunan jalan raya sepanjang 1500 km, 116 jembatan, 128 gedung, 69 gedung sekolah. SR dgn 290 lokal, SMP/SMEP 51 lokal dibangun di Sumatera Tengah. Sekitar 3000 guru baru diangkat. Unand diberi bantuan 14 juta setahun sehingga mahasiswa meningkat 100% menjadi 1567 orang. Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) didirikan di Batusangkar. BKIA/BP dibangun sebanyak 45 buah. Wali nagari diberi honorarium Rp. 200,- sd. Rp 1.240,- per bulan. Gaji wali nagari ketika itu hampir sama dengan gaji Kepala Jawatan di Propinsi. Bank Pembangunan Daerah didirikan. Produksi padi meningkat 40.000 ton. Pertanian dimajukan, bahkan bibit kuda pacu di impor guna meningkatkan mutu kuda di daerah ini didatangkan dari Australia (Catatan Abraham Ilyas).

- Fase 2. *Pecahnya perang Maret-Juni 1958*. Pusat tiba-tiba menyerang Padang dan Bukittinggi. Daerah bertahan dan melawa. Maka konflik bersenjata antara kekuatan PRRI dan tentara Soekarno (APRI) tak dapat dielakkan. PRRI dengan kekuatan puluhan ribu pasukan reguler dan kelompok milisi sipil dari pemuda kampung, mahasiswa dan pelajar, diterjunkan ke medan tempur. Sementara itu serdadu APRI (atau "tentara pusat") mengerahkan lebih 20.000 personil, umumnya dari Diponegoro yang waktu itu Panglimanya adalah Kol. Soeharto dan yang kemudian mayoritas jajaran pasukan Diponegoro itu terlibat PKI.
- Fase 3. *Perang gerilya pertengahan 1958-1961*. Perang gerilya dan tindakan brutal dan pelanggaran HAM oleh negara, khususnya militer dan aparat keamanan. Dalam periode inilah terjadinya banyak korban akibat penyalahgunaan wewenang militer, teror, pemerkosaan, pembakaran dan aksi "penggedoran" rumah penduduk, sampai pada penyiksaan dan pembunuhan. Lebih tragis lagi, sebegitu banyak generasi muda yang hilang (generasi antara angkatan 45 dan 66).

Menurut laporan korban di pihak (pemerintah) terbunuh sebanyak 983 orang, 1.695 luka-luka dan 154 orang hilang, sementara pihak PRRI sebanyak 6.373 terbunuh, 1.201 terluka dan yang tertangkap serta 6.057 yang menyerah (W.A. Hanna, 1959:14). Menurut sumber resmi Kodam 17 Agustus di pihak PRRI sebanyak 6.115 tewas dan 627 yang hilang, sedang pihak Kodam III/APRI sebanyak 1.031 tewas, dengan rincian 329 tentara, 56 brimob, 67 OPR, 7 pegawai dan 572 rakyat (Caturwarsa, 1963: 81). Jumlah ini belum termasuk kasus-kasus penyiksaan dan pemerkosaan serta teror.

- Fase 4. Fase Ekses Perang 1961-1965, yaitu gencatan senjata dan era kemenangan tentara Sukarno dan pendukungnya serta diberlakukannya Demokrasi Terpimpin yang menandai dimulainya rejim Orde Lama dengan mesin politiknya, PKI dan pemuda OPR. Kelompok ini tiba-tiba ikut menjadi pemenang dan mulai melakukan tindakan semana-mena tanpa ada kekuatan yang mampu mencegahnya. Mereka pun emlakukan teror, pembunuhan dan penekanan terhadap semua unsur yang dituduh terlibat PRRI. Termasuk razia gestapu dan

keluarnya KTP dengan cap "K" rumah cap "X" bagi eks PRRI dan macam-macam larangan. Antara lain tidak diperbolehkan naik haji, razia dan pemeriksaan di pos penjagaan setiap jarak tentu di jalan-jalan umum. Di belakang hari rejim Orde Baru melakukan hal yang sama. Setiap unsur Orde Lama dihapuskan dan terjadinya "killing fields" terhadap antek-antek Orde Lama.

- Pendekatan CIA terhadap PRRI menjadi makin jelas setelah komporomi-kompromi yang gagal antara perwira daerah (istilah Kahin "kolonel pembangkang") dengan Jakarta bulan April 1957. Untuk menjelaskan pada tahap mana dan dalam bentuk apa keterlibatan AS dalam kasus PRRI, marilah kita melakukan *flash back* kasus PRRI berikut ini.

- Bagaimana CIA terlibat dengan PRRI? Hubungan CIA dengan “kelonel pembangkang” sudah dimulai awal 1950-an.
- lewat kontak-kontak informal-individual. Salah seorang “contact person” mereka ialah Sutan Alamsyah Simawang, seorang pedagang Minang yang mondar-mandir Jakarta-Padang. Selama PD II ia melarikan diri ke Australia dan mendapat latihan CIA di sana dan kemudian masuk kembali ke Indonesia menjadi “agent CIA”. Sampai pertengahan 1950-an ia tetap membina hubungan dengan Kedutaan Besar AS di Jakarta (Cotchran, kemudian digantikan Cumming, lalu Alison). Agen CIA yang menangani hubungan dengan St. Alamsyah Simawang ialah James M. Smith perwira berusia 34 tahun yang sebelumnya pernah bertugas di Medan dan mengenal baik sejumlah perwira lokal di Medan, termasuk Simbolon. Pimpinan CIA di Jakarta, Valentine Goodell (50 tahun), sebelumnya juga pernah bertugas di perkebunan di Sumatera Timur, mengizinkan Smith untuk membina hubungan dengan perwira Sumatera via Sutan Alamsyah. (Tentu setelah mendapat izin dari Washington).<sup>5</sup>
- Pembicaraan awal dengan Kol. Moh. Hussein dan kawan-kawan di Padang dan Bukittinggi menjadi pijakan awal. “Waktu itu kami tak mendiskusikan soal bantuan senjata” kenang Smith. “Mereka lebih membutuhkan bantuan ekonomi”, lanjut nya.<sup>6</sup> Smith diperkuat dengan agen CIA yang lain, Dean Almy (30 tahun), mantan veteran Perang Korea yang diperbantukan [menyamar] sebagai tenaga diplomatik di konsulat AS di Medan. Belajar bahasa Indonesia satu tahun di Yale and Cornell, ia fasih bahasa Indonesia dan siap maju ke lapangan. Satu hari setelah Simbolon dan rombongannya yang mundur dari Medan ke Padang (3 Oktober 1957), Almi meluncur sendirian ke Bukittinggi naik jeep. Di bangku sampingnya ada sebuah tas berisi US\$ 50 ribu dolar untuk membeli beras bagi logistik anak buah Simbolon. Mereka nantinya bertemu Simbolon di sebuah rumah militer di atas Ngarai, Bukittinggi.
- Sumber saya di Padang, seorang perwira muda menceritakan bagaimana Smit mendekati dirinya. Ia menginap di Hotel Muaro, menyamar sebagai turis dan membuka kursus Inggris. Si perwira muda tadi adalah salah seorang peserta kursus dan di luar kelas senang berkunjung ke rumahnya sekalian memperlihatkan gambar-gambar senjata mutakhir buatan AS. Ia mulanya tak tahu tugas penyamaran yang dilakukan Smith yang pemurah dan siap memberikan bantuan uang dan buku-buku.<sup>7</sup>

Begitulah hubungan itu berkembang baik, sementara perkembangan buruk terjadi di Jakarta; aksi-aksi teror dan kemenangan demi kemenangan PKI dalam pemilihan lokal di Jawa Tengah dan di lain-lain tempat. Percobaan

---

<sup>5</sup> Kenneth Conboy & James Morrison, *Feet to The Fire. CIA Covert Operation in Indonesia, 1957-1958* (Annapolis, Maryland: Naval Institute, 1999), hal. 23-24.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Wawancara dengan beberapa perwira mantan PRRI di Padang sekitar tahun 1996.



pembunuhan terhadap Sukarno gagal,<sup>8</sup> sebagian kelompok oposisi terpaksa meninggalkan Jakarta, termasuk Zulkifli Lubis dan Sumitro. Hubungan antara Jakarta-Padang menjadi buruk dan kegaduhan akibat sabotase komunikasi (sebagian diduga oleh kelompok PKI dan sebagian oleh CIA) menyebabkan komunikasi antara kelompok perlawanan di Sumatera dan Sulawesi terputus

- Di pantai timur berlayar kapal *Duoglas*, dengan *crew* orang Norwegia. Kapal ini tadinya milik marinir Inggris dan dibeli Amerika atas saran Sumitro (yang berkedudukan di Singapura) untuk digunakan sebagai kapal sipil guna mengangkut karet Sumatera dan barang smokel (*barter trade*), guna memperkuat jaringan perdagangan kopra di Sulawesi, tetapi ini khusus digunakan untuk meningkatkan modal untuk menghidupi kelompok militer dan kaum sipil yang sudah putus hubungan dengan Jakarta.
- Dalam pada itu, perwira lapangan CIA ternyata bekerja lebih cepat dari yang diketahui oleh atasan mereka dan seringkali menyembunyikan sikap mereka yang sudah terang-terangan mendukung “kolonel pembangkang” kepada pejabat di jenjang yang lebih tinggi, sehingga sekali waktu, Duta Besar Alison marah besar karena membuat posisi AS bisa berbahaya. Laporan perwira lapangan kepada pejabat pejabat yang lebih tinggi tendensius dan provokatif. Misalnya mereka menyebut “Piagam Palembang (7 Setember 1957) sebagai “Front Nasional Melawan Komunis”. Dengan maksud agar bantuan Washington cepat meluncur.
- Pada bulan Februari 1957, jaringan CIA di Asia Tenggara sudah siap memberikan dukungan konkrit terhadap kelompok militer lokal di Sumatera Tengah dan Sulawesi Utara. Mereka tinggal menunggu aba-aba dari daerah. Tanggal 10 Februari suatu ultimatum dikeluarkan oleh kelompok “kolonel pembangkang” atas nama *Dewan Perjuangan* di Padang dengan mengajukan sejumlah tuntutan terhadap Jakarta, a.l. agar PM Djuanda mundur dari pemerintahan dan digantikan oleh Kabinet baru di bawah kepemimpinan Hatta dan Hamengkubuwono dan meminta hak-hak otonomi daerah dipulihkan. Apabila tuntutan ini tidak dipenuhi dalam tempo 5x24 jam, Dewan Perjuangan beserta pimpinan sipil dan militer siap mendirikan pemerintahan alternatif. Dan itu memang terjadi setelah 15 Februari ketika dibentuk apa yang disebut PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia).

---

<sup>8</sup> November 1957, tak lama setelah kegagalan MUNAS, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Bung Karno yang dikenal dengan “Peristiwa Cikini. Bung Karno selamat namun 9 orang tewas dan 45 orang di sekelilingnya luka-luka. Pemerintah kala itu mendeteksi jika tindakan makar tersebut didalangi oleh komplotan ekstrem kanan yang dimotori Letkol Zulkifli Loebis, pendiri Badan Rahasia Negara Indonesia (BraNI), cikal bakal BIN, dan didukung CIA. Bung Karno menuding CIA berada di belakang usaha-usaha pembunuhan terhadap dirinya. Tudingan Bung Karno terbukti 22 tahun kemudian, ketika dalam satu sesi pertemuan Komite Intelijen Senat AS yang diketuai Senator Frank Church dengan Richard Bissel Jr, mantan wakil Direktur CIA bidang perencanaan terungkap jika saat itu nama Soekarno memang sudah masuk dalam target operasi Direktur CIA, Allan Dulles. Khusus tentang keterlibatan CIA dalam kasus ini lihat Peter Dale Scott, “The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967”, *Pacific Affairs*, 58, (Summer 1985), hal. 239-264.

- Kontak antara team CIA dan PRRI di Padang berada di bawah Kol. Simbolon dan di Sulawesi berada di bawah Kol. Ventje Samuel dkk yang sewaktu PRRI deklarasikan masih sedang di Manila untuk memuluskan hubungan dengan CIA dengan kelompok perlawanan. Percaya dengan kemampuan militer pemberontak, CIA siap memberikan bantuan dalam pelbagai bentuk: pelatihan militer, logistik, perlengkapan militer dan tenaga personil pada tingkat tertentu. Pangkalan udara AS di Clark Philipina dan Okinawa di Jepang siap mensuplai bantuan yang diperlukan.
- Sejak bulan Maret 1958 CIA mulai mendrop ribuan pucuk senjata api dan mesin, lengkap dengan amunisi dan aneka granat, juga sejumlah alat perang berat seperti meriam artileri, truk-truk pengangkut pasukan, aneka jeep, pesawat tempur dan pembom, dan sebagainya. Bahkan sejumlah pesawat tempur AU-Filipina dan AU-Taiwan seperti pesawat F-51D Mustang, pengebom B-26 Invader, AT-11 Kansan, pesawat transport Beechcraft, pesawat amfibi PBV 5 Catalina dipinjamkan CIA kepada kelompok PRRI Dengan dukung CIA, kelompok perlawanan PRRI bisa memiliki angkatan udaranya sendiri yang dinamakan AUREV (AU Revolusioner). Beberapa pilot pesawat tempur tersebut bahkan dikendalikan sendiri oleh personil militer AS, tetapi juga pilot sewaan dari Korea Selatan, Taiwan, dan juga Filipina.<sup>9</sup>
- Awal Maret 1958, Armada ke-7 Angkatan laut AS yang berpangkalan Teluk Subic, Filipina mendapat perintah Pentagon – setelah izin sebelumnya dari Washington, untuk berlayar menuju Singapura dan Selat Malaka. Dalam armada itu AS juga menyertakan satu divisi pasukan elitnya, yakni US-Marine, di bawah pengawalan sejumlah kapal penjelajah dan kapal perusak disertakan dalam misi tersebut. Dalih AS, pasukan itu untuk mengamankan instalasi perusahaan minyak AS, Caltex, di Pekanbaru, Riau, di samping evakuasi warga sipil AS apabila tentara Sukarno menyerang Pekanbaru. Ini sekaligus antisipasi jika suatu saat meletus pertempuran besar. Dalam operasi “undercovert” ini AS menurunkan kekuatan yang tidak main-main. CIA menjadikan Singapura, Filipina (Pangkalan AS Subic & Clark), Taiwan, dan Korea Selatan dan Australia sebagai pos suplai dan pelatihan bagi pemberontak.<sup>10</sup> Dari Singapura, pejabat Konsulat AS yang berkedudukan di Medan, diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Kol. Simbolon, Sumitro, di Singapura dan Letkol Ventje Samuel di Manado.
- Masih dalam bulan Maret 1958, sebelum operasi perebutan pantai timur Sumatera oleh pasukan Jakarta di bawah Jendral Yani (operasi 17 Agustus), AS

---

<sup>9</sup> Salah seorang pilot bayaran warga AS bernama Allen L. Pope yang menerbangkan B-26 tertembak jatuh dan berhasil ditawan saat pertempuran udara dengan TNI AU di perairan Ambon, 18 Mei 1958. Ia kemudian dijatuhi hukuman, mati, tetapi kemudian mendapat keringanan dan lalu dibebaskan dan dipulangkan ke negerinya. Tentang insiden ini lihat William L. Bradley dan Muchtar Lubis (eds.), *Dokumen-Dokumen Pilihan tentang Politik Luar Negeri Amerika Serikat dan Asia*, Terjemahan (Jakarta: Obor, 1991), hal. 180ff.; Lihat juga Conboy & James Morrison, *Feet to The Fire. CIA Covert Operation ....*, hal. 100; 128-129.

<sup>10</sup> Tentang peran Australia, lihat Hadi Soebadio, *Keterlibatan tan Australia dalam Pemberontakan PRRI/Permesta* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002).

berniat mendaratkan bantuan militer dan logistik besar-besaran untuk pasukan pemberontak melalui pendaratan Amfibi didukung Armada ke 7. Untuk persiapan hal ini mereka mengirim tim pendahuluan beranggotakan 5 orang anggota CIA yang didrop ke Sumatera Barat. Tetapi laporan tim ini menyatakan moral tempur tentara PRRI / Permesta tidak cukup siap melawan TNI, sehingga dari ke waktu terjadi kemerosotan. Kebanyakan mereka mundur masuk hutan di pegunungan Bukit Barisan dan komunikasi bahasa “sandi” mereka tak berjalan menurut semestinya, sehingga rencana droping senjata lewat kapal selama di pantai barat, dekat Muaro Penyalinan gagal.

- Sementara itu dari sudut pandang Jakarta persiapan menghadapi PRRI juga tidak tanggung-tanggung. Bahkan termasuk yang paling serius dan terbesar, dan terlama di antara sejumlah pergolakan daerah menentang rejim Jakarta selama dekade 1950-an (seperti gerakan DI/TII di Aceh dan Jawa Barat serta Sulawesi Selatan, gerakan separatis di Kalimantan Barat dan RMS Maluku). Sedemikian seriusnya, sehingga tidak pernah terjadi sebelumnya dan juga tidak sesudahnya, kecuali dalam kasus PRRI, di mana Jakarta mengerahkan semua kekuatan angkatan bersenjata (laut, darat dan udara serta polisi dan satuan intelijen). Kekuatan PRRI di kota-kota dengan mudah dapat didobrak dan mundur ke pedalaman dengan melancarkan perang gerilya. Pusat perlawanan terutama terjadi di Sumatera Barat, Riau Sumatera Selatan serta mitra PRRI, yaitu Permesta di Sulawesi.
- Lambat laun CIA kecewa dengan “kemajuan” yang diharapkannya dari PRRI di medan pertempuran, direktornya, Allen Dulles, saudaranya Menlu AS, John Foster Dulles, merasa “not very happy”, dengan keadaan mitra mereka di Sumatera. Maka secara berangsur-angsur sokongan ke PRRI dikurangi dan sebaliknya berbalik membantu Jakarta. Sekalagi lagi pragmatisme politik luar negeri AS ditunjukkan, Ini juga terkait dengan mundurnya John Foster Dulles, dari jabatannya dan dengan demikian politik AS terhadap Indonesia juga mengalami perubahan perlahan-lahan, hingga akhirnya membiarkan PRRI kalah, sementara mengencangkan dukungannya ke Jakarta setelah kejatuhan rejim Orde Lama Soekarno.

### **Penutup: Tindakan Pusat yang Eksektif**

- Kasus perlawanan PRRI menentang rejim Jakarta selama empat tahun (1958-1961) bukanlah semata-mata konflik pusat-daerah, dan juga bukan semata-mata melibatkan CIA, melainkan juga Australia dan beberapa negara di Asia Tenggara. Perlawanan PRRI juga bukan gerakan separatis sebagaimana yang sering digeneralisasikan dengan kebanyakan tipe pergolakan daerah selama tahun 1950-an dan sesudahnya, melainkan sebuah “koreksi total” dan keras terhadap rejim pusat yang dipandang melakukan pelanggaran konstitusi. Bukti-bukti bahwa PRRI bukan gerakan separatis amat banyak. Misalnya tuntutan mereka untuk mengganti Kabinet Baru dengan Hatta dan tokoh Jawa Hamengkubowono IX. PRRI tidak pernah menukar simbol negara RI (bendera, lagu kebangsaan dan labang-lambang kenagaraan lainnya). Bahkan di beal Kang

meja kerja Simbolon, foro Sukarno tetap terpajang gagah. Justru sebaliknya, karena dorongan nasionalisme dan patriotisme merekalah yang membuat mereka dipaksa mengangkat senjata, setelah segala cara prosedur konstitusional ditempuh.

- Episode PRRI yang menjerumuskan negeri ini ke arena “perang saudara” itu tiak hanya membawa tragedi sejarah pada masa nya, tetapi juga paska perang. Korban yang meninggal pun juga cukup besar. Menurut sebuah laporan tercatat korban pada dua tahun pertama di pihak pemerintah sebanyak 983 orang terbunuh, 1.695 luka-luka dan 154 orang hilang. Sementara pihak PRRI sebanyak 6.373 terbunuh, 1.201 terluka dan yang tertangkap serta 6.057 yang menyerah. Menurut sumber resmi Kodam 17 Agustus (1963) di pihak PRRI sebanyak 6.115 tewas dan 627 yang hilang, sedang pihak Kodam III/APRI sebanyak 1.031 tewas, dengan rincian 329 tentara, 56 brimob, 67 OPR, 7 pegawai dan 572 rakyat. Jumlah ini belum termasuk korban “generasi yang hilang” dari angkatan pemuda Minang karena terbunuh dan hilang sampai akhir peperangan,<sup>11</sup> di samping kasus-kasus penyiksaan dan pemerkosaan serta teror di nagari-nagari.<sup>12</sup>
- Dengan demikian dampak terburuk dari intervensi AS ialah menyediakan jerami di panas terik. Perang saudara itu tidak saja merupakan tragedi yang sulit dilupakan bagi penduduk di kawasan PRRI (Sumatera dan Sulawesi), melainkan juga mencoreng wajah politik Indonesia di mata negara tetangga dan dunia internasional karena baru saja melangsungkan “Konferensi Asia-Afrika” (1955) yang menaikkan reputasi dan citra Indonesia di mata dunia.

Keterlibatan AS dalam kasus konflik internal Indonesia telah memperburuk keadaan paska perang saudara. Terjadinya kebangkrutan negara dan kemiskinan yang merajalela (krisis moneter inflasi mencapai 600%), bersamaan dengan terjadinya polarisasi panggung politik (pusat-daerah) yang semakin goyah dan munculnya tripolarisasi (Angkatan Darat, Presiden Suakrno dan PKI) yang semakin ketat dan tajam. Sekali lagi jarum bandul mengayun ke belakang, ketika rejim Sukarno jatuh dan naiknya rejim Suharto tahun 1966. Tripolarisasi baru pun muncul: Angkatan Darat, Presiden Suharto dan minus PKI, yang kemudian diperankan oleh Golkar. Ketiga unsur ini menjadi motor bagi terjadinya “ladang pembantaian” (*killing fields*) terhadap ratusan ribu, kalau bukannya jutaan, anak bangsa ketika *cybernetic noise* yang memakakkan itu membutakan akal sehat dan hati nurani bangsa yang baru saja memerdekakan dirinya dari penidnasan penjajahan.. \*\*\*

---

<sup>11</sup> Willar H.Hanna, “Bung Karno’s Indonesia: Part VII: The Rebel Cause”, *Southeast Asia Series*, Vol.VII, No. 22 (1958), hal. 14.

<sup>12</sup> Sekedar ilustrasi lihat, Syamdani, *PRRI. Pemberontakan atau Bukan?* Jakarta: Medpress, 2009.

959.803 1

206/Hd/2011-F.1(1)

Zed

k. 1

UNIV. 1

N  
G

### Kepustakaan.

Hanna, Willar H. "Bung Karno's Indonesia: Part VII: The Rebel Cause", *Southeast Asia Series*, Vol. VII, No. 22 (1958).

Kahin, Audrey and McTurnan Kahin, *Subversi sebagai Politik Luar Negeri. Menyingkapkan Keterlibatan CIA di Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 1998).

Leirissa, R.Z. *PRRI-Permesta. Strategi Membangun Tanpa Komunis*. Jakarta: Grafiti Pers, Cetakan Ketiga, 1991.

Mestika Zed. "PRRI dalam Perspektif Militer dan Politik Regional: Sebuah Reinterpretasi", dalam *Jurnal Studi Amerika* (Universitas Indonesia), Vol. IV (Januari-Juli 1999): pp. 99-122.

Mestika Zed, "Pembangkalan Kolonel dan Keterlibatan Amerika Serikat dalam PRRI", Artikel resensi buku Kahin (1998), dalam *Tingkap*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial-Budaya & Ekonomi, Vol. I No. 1 (April 1998), hal. 76-80.

Mestika Zed, Edi Utama dan Hasril Chaniago, *Sumatra Barat di Panggung Sejarah 1945-1950*. Jakarta: Sinar Harapan, 1998.

Mestika Zed dan Hasril Chaniago, *Perlawanan Seorang Pejuang. Biografi Kolonel Ahmad Hussein*. Jakarta: Sinar Harapan, 2001.

Scott, Peter Dale "The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967", *Pacific Affairs*, 58, (Summer 1985), hal. 239-264.

Supit, Bert Dkk. *Apa Beda Permesta dan PRRI*. Jakarta: Lembaga Kajian Sejarah Indonesia, 2006.

Syamdani, *PRRI. Pemberontakan atau Bukan?* Jakarta: Medpress, 2009.